



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

2024

RENCANA KERJA (RENJA)



Jalan Merdeka No. 06 Telp (0567) 21131
Putussibau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Rencana Kerja yang telah disusun ini sebagai acuan atau bingkai dari rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak terlepas dari RENSTRA Tahun 2021 – 2026 untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2024 merupakan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 48 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini telah mengkomodir Program Prioritas Nasional Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan juga merujuk kepada Renstra DPMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2024, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2024 DPMD Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disertai dengan adanya Penguatan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hal ini mengingat luasnya pelayanan yang diberikan serta kompleksitasnya yang ada di desa (278 Desa) serta pelaksanaan UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan segala aturan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 27 Febuari 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu



PUPINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sitematika	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD.....	62
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Penutup.....	64

DAFTAR TABEL

2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2021-2022	7
2.1.2	Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2021	14
2.1.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas PMD Tahun Anggaran 2021	16
2.1.4	Pengukuran Kinerja DPMD Th 2021	19
2.3.1	Pencapaian Indikator kinerja Utama Th 2021	25
2.3.2	Gambaran keterkaitan antara permasalahan utama Pem kab. KH dengan Permasalahan pokok DPMD.....	26
2.4.1	Matrik Rencana Kerja sebelum dan sesudah perubahan beserta pendanaan DPMD Th 2021	30
2.5.1	Usulan Program dan kegiatan Th 2024	39
3.2.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Th 2022	49
3.3.1	Rumusan Rencana Program dan Keg. Th 2024 dan Prakiraan Maju Th 2024	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan dalam pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021-2026 untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Penyusunan Renja Tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA tahun sebelumnya (2016-2021) yang diawali dari pengamatan lapangan pengkajian data dan informasi dalam pelaksanaan program/kegiatan selama ini baik pelaksanaan program nasional urusan wajib pemerintahan daerah maupun program prioritas utama SKPD yang bersangkutan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2024 selain berorientasi pada tupoksi Dinas juga berorientasi pada keberlanjutan dari hasil yang telah dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan Renstra 2016-2021 dengan lebih mengoptimalkan hasil yang telah dicapai selama ini.

Renja OPD merupakan bagian dari dokumen strategis pelaksanaan perencanaan untuk periode satu tahun, yang akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (RKPD) Tahun 2024 memuat tentang kebijakan program/kegiatan prioritas pembangunan pemberdayaan baik dilaksanakan langsung oleh DPMD Kabupaten Kapuas Hulu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Instrumen kebijakan yang telah tertuang didalam Renja Tahun 2024 ini pada dasarnya bertujuan mengarahkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan agar mencapai sasaran yang diinginkan sejalan dengan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dari aspek perencanaan yang diarahkan semaksimal mungkin agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan datang dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024.

Renja OPD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu program/kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja ini diharapkan mampu merespon kebutuhan masyarakat dan pemerintahan desa kedepannya

dalam bingkai sebuah kosep **“Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD DPMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini, dilandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud Dan Tujuan dari Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai acuan atau bingkai dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2024 sebagai bentuk

penjabaran lebih luas dari konsep Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, dengan harapan program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran yang bermanfaat, guna meningkatkan taraf hidup kelompok sasaran itu sendiri serta dapat menumbuhkan Sumber Daya Manusia yang kreatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Tungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 4.1. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang diuraikan dalam lampiran 2.1 Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan capaian Renstra OPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau realisasi APDB diakhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan berdasarkan Capaian atau Realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

Matrik Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023					
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Renja Peragat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4		
2	13	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
2	13	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Rp 11,321,600	Rp 6,321,600	Rp 8,224,000	Rp 8,224,000	100%	Rp 6,588,000	Rp 21,133,600	1.9
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Rp 10,947,000	Rp 5,747,000	Rp 5,808,800	Rp 5,808,800	100%	Rp 2,759,000	Rp 14,314,800	1.3
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Rp 12,591,400	Rp 7,591,400	Rp 5,487,000	Rp -	0%	Rp 6,530,500	Rp 14,121,900	1.1
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Rp 10,549,000	Rp 5,549,000	Rp 5,699,000	Rp 5,549,000	97%	Rp 5,026,000	Rp 16,124,000	1.5
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Rp 11,499,000	Rp 6,499,000	Rp 5,852,000	Rp -	0%	Rp 6,342,000	Rp 12,841,000	1.1
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Rp 7,179,600	Rp 2,179,600	Rp 6,722,400	Rp 6,722,400	100%	Rp 10,411,000	Rp 19,313,000	2.7
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Rp 15,261,300	Rp 10,261,300	Rp 8,298,400	Rp -	0%	Rp 27,932,400	Rp 38,193,700	2.5

2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah yang mengikuti pelatihan pegawai	Rp 50,000,000		Rp 18,975,000	Rp 17,519,000	92%	Rp 31,100,000	Rp 48,619,000	1.0
2	13	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	13	01	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3,324,000	Rp 3,324,000					Rp 3,324,000	1.0
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Rp 9,186,000	Rp 9,186,000	Rp 3,106,100	Rp 3,106,100	100%	Rp 11,673,800	Rp 30,045,800	3.3
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	Rp 36,661,000	Rp 36,661,000	Rp 23,176,400	Rp 23,176,400	100%	Rp 11,700,000	Rp 71,537,400	2.0
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan langganan	Rp 3,420,000	Rp 3,420,000					Rp 3,420,000	1.0
2	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu	Rp 73,440,000	Rp 73,440,000	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	100%	Rp 18,960,000	Rp 98,400,000	1.3
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Rp 550,000,000	Rp 344,489,000	Rp 350,357,000	Rp 350,010,783	100%	Rp 395,760,000	Rp 1,090,259,783	2.0
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen / arsip yang tertata	Rp 13,354,200	Rp 13,354,200	Rp 11,200,000	Rp 11,200,000	100%	Rp 8,713,000	Rp 33,267,200	2.5
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem dn pelayanan elektronik	Rp 12,600,000	Rp 12,600,000	Rp 41,600,000	Rp 41,600,000	100%	Rp 42,600,000	Rp 96,800,000	7.7
2	13	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000					Rp 27,000,000	1.0
2	13	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 121,763,300	Rp 121,763,300	Rp 16,000,000	Rp 15,999,540	100%	Rp 62,798,800	Rp 200,561,640	1.6
2	13	01	2.08		Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

2	13	01	2.08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000				Rp 6,180,000	Rp 33,180,000	1.2
2	13	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air, listrik	Rp 79,200,000	Rp 79,200,000	Rp 54,118,848	Rp 53,615,000	99%	Rp 79,200,000	Rp 212,015,000	2.7
2	13	01	2.08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang/bulan tenaga kebersihan	Rp 241,250,000	Rp 241,250,000	Rp 224,910,300	Rp 224,267,260	100%	Rp 716,674,440	Rp 1,182,191,700	4.9
2	13	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Ketersediaan Pelayanan (BBM, pajak, biaya pemeliharaan)	Rp 109,959,150	Rp 109,959,150	Rp 106,312,650	Rp 106,298,850	100%	Rp 82,596,400	Rp 298,854,400	2.7
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	jumlah jasa tenaga perbaikan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000					Rp 5,000,000	1.0
2	13	01	2.09	010	Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	jumlah kegiatan pemeliharaan/ Rehab Gedung Kantor	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000					Rp 40,000,000	1.0
2	13	02			Program : Penataan Desa									
2	13	02	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa									
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Rp 2,990,000,000	Rp 2,990,000,000	Rp 3,420,000,000	Rp 3,221,894,557	94%	Rp 150,000,000	Rp 6,361,894,557	2.1
2	13	03			Program : Peingkatan Kerjasama Desa									
2	13	03	2.01		Kegiatan : fasilitasi kerjasama antar desa									
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah desa yang difasilitasi	Rp 300,000,000		Rp 64,973,000	Rp 64,973,000	100%	Rp 65,194,000	Rp 130,167,000	0.4
2	13	04			Program : Administrasi Pemerintahan Desa									
2	13	04	2.01		Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi									

2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi	Rp 547,620,000	Rp 547,620,000				Rp 86,747,000	Rp 634,367,000	1.2
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi	Rp 3,402,852,882	Rp 3,402,852,882	Rp 274,259,000	Rp 274,205,000	100%	Rp 282,871,000	Rp 3,959,928,882	1.2
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terbina	Rp 106,798,000	Rp 106,798,000	Rp 109,718,000	Rp 109,718,000	100%	Rp 42,498,000	Rp 259,014,000	2.4
2	13	04	2.01	010	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kades	Jumlah Desa yang Melakukan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Rp 200,000,000		Rp 460,417,900	Rp 460,390,310	100%		Rp 460,390,310	2.3
2	13	04	2.01	011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa	Rp 85,479,000	Rp 85,479,000	Rp 18,129,000	Rp 18,129,000	100%	Rp 3,300,300	Rp 106,908,300	1.3
2	13	04	2.01	013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dibina Tata Kelola Aset Desa	Rp 191,601,100	Rp 191,601,100	Rp 59,749,800	Rp 59,749,800	100%	Rp 47,476,000	Rp 298,826,900	1.6
2	13	04	2.01	014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang dilakukan peningkatan Kapasitas BPD	Rp 87,366,000	Rp 87,366,000					Rp 87,366,000	1.0
2	13	04	2.01	015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang menyelesaikan Batas desa (perbup batas desa)	Rp 99,514,000	Rp 99,514,000	Rp 27,450,000	Rp 26,693,000	97%		Rp 126,207,000	1.3
2	13	04	2.01	016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	jumlah desa	Rp 79,928,200	Rp 79,928,200					Rp 79,928,200	1.0
2	13	04	2.01	018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangan Desa	Rp 72,920,000	Rp 72,920,000				Rp 72,919,500	Rp 145,839,500	2.0
2	13	05			Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									

2	13	05	2.01		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota									
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,LP M,dan Karang Taruna)	Jumlah Lembaga Adat	Rp 431,394,000	Rp 431,394,000	Rp 379,651,200	Rp 36,435,200	10%	Rp 378,551,000	Rp 846,380,200	2.0
2	13	05	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Rp 223,499,200							0.0
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Bumdes Sehat/Aktif	Rp 180,501,800	Rp 180,501,800	Rp 65,687,000	Rp 64,737,000	99%	Rp 65,277,000	Rp 310,515,800	1.7
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok TTG yang dibina	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000					Rp 50,000,000	1.0
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kegiatan Terfasilitasi	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 2,900,000,000	Rp2,897,300,000	100%	Rp2,000,000,000	Rp 6,897,300,000	3.4
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	jumlah tim yang difasilitasi	Rp 200,000,000		Rp 90,240,000	Rp 88,240,000	98%	Rp 69,806,000	Rp 158,046,000	0.8

Tabel 2.1.2
Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tahun 2022

NO	Program	Kegiatan
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

1		Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1		Penyedia Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Program : Penataan Desa	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	
1		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa
	Program : Peninkatan Kerjasama Desa	
	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	
1		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi	
1		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
2		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
3		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades
4		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
5		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
6		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota	
1		Fasilitasi Penataan, Pemberdayan dan Pendayagunan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

		Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna)
2		Failitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
3		Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
4		Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 di rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Anggaran dan Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 8,224,000	Rp 8,224,000	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5,808,800	Rp 5,808,800	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5,487,000	Rp -	0%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5,699,000	Rp 5,549,000	97%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5,852,000	Rp -	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,722,400	Rp 6,722,400	100%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 8,298,400	Rp -	
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,278,478,045	Rp 3,265,185,030	100%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 209,546,000	Rp 209,546,000	100%
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2,900,000	Rp 2,900,000	0%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9,166,000	Rp 9,166,000	97%

12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 7,706,000	Rp 7,706,000	100%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 524,100,400	Rp 524,100,400	100%
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 18,975,000	Rp 17,519,000	92%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 3,106,100	Rp 3,106,100	100%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 23,176,400	Rp 23,176,400	100%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	100%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 350,357,000	Rp 350,010,783	100%
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 11,200,000	Rp 11,200,000	100%
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 41,600,000	Rp 41,600,000	100%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
21	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 16,000,000	Rp 15,999,540	100%
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
22	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 54,118,848	Rp 53,615,000	99%
23	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 224,910,300	Rp 224,267,260	100%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 106,312,650	Rp 106,298,850	100%
	Program : Penataan Desa			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa			
25	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Rp 3,420,000,000	Rp 3,221,894,557	94%
	Program : Peningkatan Kerjasama Desa			
	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa			
26	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	Rp 64,973,000	Rp 64,973,000	100%

	Program : Administrasi Pemerintahan Desa			
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi			
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 274,259,000	Rp 274,205,000	100%
28	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp 109,718,000	Rp 109,718,000	100%
29	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kades	Rp 460,417,900	Rp 460,390,310	100%
30	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp 18,129,000	Rp 18,129,000	100%
31	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 59,749,800	Rp 59,749,800	100%
32	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 27,450,000	Rp 26,693,000	97%
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota			
33	Fasilitasi Penataan, Pemberdayan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Rp 379,651,200	Rp 36,435,200	10%
34	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 65,687,000	Rp 64,737,000	99%
35	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 2,900,000,000	Rp2,897,300,000	100%
36	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 90,240,000	Rp 88,240,000	97,78%
Jumlah		Rp 12,851,555,643	Rp 12.588,487,893	97,95%

Tabel 2.1.4
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2022

Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	7,55%	3,3%	257%
	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	38,48%	41,36%	105%
	Persentase Peningkatan Bumdesma	5,03%	5,03%	100%
	Persentase Penyelesaian Batas Desa	38,48%	49,64%	129%
	Persentase Desa yang Memiliki Bumdes	78,42%	91,63%	116%
Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi dan Birokrasi Perangkat Daerah	25,01	20,40	81,56%
	Predikat SAKIP	BB	BB	100%

Dari tabel 2.1.3 diatas dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2021 berupa capaian 81 - 100 % berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat di nilai dengan penilaian berikut ini :

1. Kegiatan dengan realisalsi anggaran yang mencapai 86% - 257% dikategorikan berhasil / tercapai. Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya.
2. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai lebih kecil dari 85% dan dikategorikan tidak tercapai.

Dalam sub Bab ini Juga dilampirkan Tabel 2.1.3 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Tahun 2020 -2024 (Tahun Berjalan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Masing - masing misi yang diemban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tujuan berkaitan dengan upaya melaksanakan harapan - harapan yang tersirat dalam visi. Ada pun tujuan tersebut memberikan arah yang lebih jelas agar perbaikan-perbaikan harapan yang ingin di capai lebih terfokus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satu penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tugas mendukung Visi Pemerintah Daerah tertuang dalam Renstra 2021 - 2026 yaitu ,*" Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil "*.

Dimana hasil dari penjabaran visi yang merupakan misi Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah investasi.

Strategi Organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang di tetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahn Desa
- b. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa
- c. Adanya peningkatan pembangunan infrastruktur desa melalui gotong royong masyarakat.
- d. Adanya peningkatan pemahaman kelembagaan desa dalam menyelesaikan batas desa
- e. Adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan desa Dalam pendayagunaan teknologi tepat guna menunjang perekonomian masyarakat setempat.
- f. Adanya peningkatan masyarakat desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang efektif dan efesien.

- g. Adanya peningkatan percepatan penyelesaian Adminitrasi Profil Desa.
- h. Adanya peningkatan fungsi BUMDes yang telah terbentuk.
- i. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang BUMDes.
- j. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- k. Adanya Peningkatan peran wanita didalam membantu penambah /penunjang penghasilan keluarga.

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dalam:

1. Penetapan rencana strategis Dinas.
2. Pengoorinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan dinas.
3. Penyusunan Kebijakan teknis dan peenyelenggaraan di bidang penataan desa, peningkatan Kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaann Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, masyarakat hukum adat;
4. Penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Dinas;
5. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dan Kinerja dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu disesuaikan pada target yang telah disusun sesuai indicator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021 - 2026, RKPD 2022 serta Renja SKPD 2024. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020-2024.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	7,55%
		Meningkatnya Kinerja penataan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	39,40%
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Bumdesma	5,03%
		Meningkatnya Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa	38,48%
		Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Desa yang Memiliki Bumdes	78,42%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB

Adapun Isu - isu penting yang merupakan bagian dari masalah tetapi belum menjadi masalah publik, isu berkembang dari orang perorang kemudian dapat berkembang menjadi persoalan orang banyak, dan mulai ramai di perbincangkan baik melalui berbagai media,disinilah letak isu menjadi masalah publik, isu - isu tersebut harus di kelola dengan berbagai kebijakan dan program -program yang mampu meminimalisir terjadinya masalah yang lebih besar.

Oleh karenanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu melihat dan mengidentifikasi isu-isu yang ada selama ini sebagai isu strategis adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.3.2

Gambaran Keterkaitan Antara Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Permasalahan Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah utama	Akar masalah
1	Kurangnya minat masyarakat desa yang berpotensi untuk menjadi aparatur desa	Masih rendahnya SDM aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga berdampak pada percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kesejahteraan bagi perangkat desa.
			Kurangnya SDM potensial di masyarakat desa
			Kebiasaan sikap masyarakat yang kurang terbuka
2	Belum kuatnya karakter dan koordinasi atau kerja sama/komitmen dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di desa	Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia ASN dan Non ASN baik di bidang pembinaan maupun pengawasan
			Dukungan pendanaan yang belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
			Regulasi yang belum memadai bagi OPD dalam kerjasama pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa
			Luas wilayah dan Topografi dengan tingkat kesulitan jangkauan ke desa-desa
3	Lemahnya pemahaman para pengurus lembaga kemasyarakatan desa (BPD, TP-PKK Desa LPM dll). Tentang tugas dan fungsinya	Masih rendahnya peranan lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Dukungan dana operasional yang belum optimal bagi lembaga masyarakat desa

			Kurangnya minat masyarakat yang potensial untuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan yang disebabkan minimnya jaminan kepastian kesejahteraan yang rasional
			Luas wilayah dan Topografi yang menjadi tingkat kesulitan jangkauan pembinaan dan pengawasan serta keberadaan pengurus tidak terfokus pada satu komunitas (di pusat pemerintahan desa) sehingga sulit berkembang
4	Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap masyarakat masih sangat rendah	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa, akibatnya lambatnya perkembangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Pembinaan dan penyampian informasi tentang aturan belum sampai pada sebagian besar masyarakat desa baik oleh pemerintah kecamatan kab. kh maupun pemerintah desa
	Pemahaman masyarakat tentang membangun desa dan desa membangun masih sangat kurang		Masih minimnya sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat seperti, listrik dan telekomunikasi (Internet)
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam RKP dan Musdes
5	Kurangnya SDM yang mampu sebagai pengurus BUMDES	Masih rendahnya peran lembaga ekonomi perdesaan (BUMDES) dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan produk unggulan desa dan pedesaan	Kekhawatiran masyarakat gagal dalam mengurus BUMDES sehingga bisa menjadi masalah baru
	Lemahnya SDM pengurus BUMDES		Minimnya pasar terhadap produk-produk unggulan yang bisa dikerjakan oleh kebanyakan Masyarakat desa
	Masih banyak BUMDES yang sudah terbentuk tapi belum beraktivitas dengan baik		
6	Regulasi yang belum mengikat tentang masa jabatan perangkat desa (Sekretaris, kadis dan kaur/staf)	Pergantian pemimpin tidak menjamin Keberlanjutan program dan para perangkat desa	Adanya tuntutan masyarakat terhadap kades baru untuk melaksanakan janjinya

	Lemahnya pembinaan dan pengawasan para aparatur kecamatan dan DPMD		
7	Rendanya keseimbangan antara kemampuan dan jumlah ASN dengan beban tugas dalam pembinaan atau pengawasan aparatur desa dan dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya aparatur sipil negara di kabupaten kapuas hulu	Penerimaan calon ASN sangat terbatas
		Masih sangat terbatasnya ASN yang memiliki kapasitas sesuai dengan yang diharapkan/sesuai dengan tuntutan beban kerja	Tuntutan perkembangan atau percepatan pembangunan tidak diikuti dengan pembiayaan serta sarana dan prasarana termasuk keterbatasan SDM

Uraian diatas merupakan gambaran masalah yang dialami oleh desa tertinggal dan sangat tertinggal, maka dari itu permasalahan utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yakni: “Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal”.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja SKPD

Rencana Kerja adalah Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui berbagai kegiatan.

Rancangan Awal dari RENJA 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Meliputi 5 Program 11 Kegiatan dan 38 sub kegiatan Dengan jumlah pagu anggaran 12.851.555.643- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus juta lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) Kegiatan yang disusun dari rencana awal Renja 2022 sudah termasuk usulan dari masyarakat melalui Musrenbang baik Tingkat Desa atau Kecamatan, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4.1
Matrik Rencana Kerja (Renja) Sebelum dan Sesudah Perubahan Beserta Pendanaan
Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan desa
Tahun 2022

NO	RENCANA AWAL RENJA SKPD					SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2022					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2		4	5	6	2		4	5	6	
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%		
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 8,224,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 8,224,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,808,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,808,800	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,487,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,487,000	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,699,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,699,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,852,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,852,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	8 Dok	Rp 2,179,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	8 Dok	Rp 6,722,400	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 8,298,400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 8,298,400	
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH				Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. KH	Jumlah bulan	12 Bln	Rp 3,529,501,075	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. KH	Jumlah bulan	12 Bln	Rp 3,278,478,045	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Pengelola Keuangan	11 org	Rp 232,600,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Pengelola Keuangan	11 org	Rp 209,546,000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 8,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 2,900,000	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 9,166,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 9,166,000	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 8,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	30 Dok	Rp 7,706,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	6 Dok	Rp 7,706,000	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kab. KH	Jumlah orang/bulan tenaga honorer	180 Orang/ Bulan	Rp 524,100,400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kab. KH	Jumlah orang/bulan tenaga honorer	180 Orang/ Bulan	Rp524,100,400	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. KH	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pegawai	1org	Rp 18,975,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. KH	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pegawai	1org	Rp 18,975,000	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. KH	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24 jenis	Rp 3,106,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. KH	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24 jenis	Rp 3,106,100	

2	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	9 Dok	Rp 23,176,400	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	9 Dok	Rp 23,176,400	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. KH	Jumlah bulan	12bln	Rp 6,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. KH	Jumlah bulan	12bln	Rp 6,000,000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	231 kali	Rp 68,185,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	250 kali	Rp 350,357,000	
5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen / arsip yang tertata	1 Dok	Rp 4,200,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen / arsip yang tertata	1 dok	Rp 11,200,000	
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah sistem dn pelayanan elektronik	3 Sistem	Rp 33,600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah sistem dn pelayanan elektronik	7 Sistem	Rp 41,600,000	
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. KH	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	Rp 16,000,000	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. KH	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	Rp 16,000,000	
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					

						Daerah					
1	Penyedia Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. KH	jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air, listrik	3 layanan	Rp 79,200,000	Penyedia Jasa Komuniskasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. KH	jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air, listrik	3 layanan	Rp 54,118,848	
2	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD kab. KH	jumlah orang/ bulan tenaga kebersihan	4 Org	Rp 151,144,000	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD kab. KH	jumlah orang/ bulan tenaga kebersihan	4 Org	Rp 224,910,300	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. KH	Jumlah Ketersediaan Pelayanan (BBM, pajak, biaya pemeliharaan)	3 jenis	Rp 6,360,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. KH	Jumlah Ketersediaan Pelayanan (BBM, pajak, biaya pemeliharaan)	3 Jenis	Rp 106,312,650	
	Program : Penataan Desa					Program : Penataan Desa					
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa					Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa					
1	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi	14 Desa	Rp 3,420,000,000	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi	14 Desa	Rp 3,420,000,000	
	Program : Peningkatan Kerjasama antar Desa										

	Fasilitas Kerjasama antar desa										
1	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi	25 Desa	Rp 64,973,000	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi	25 Desa	Rp 64,973,000	
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa					Program : Administrasi Pemerintahan Desa					
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi	DPMD Kab. KH				Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi	DPMD Kab. KH				
1	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang di fasilitasi	278 Desa	Rp 188,921,000	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang di fasilitasi	278 Desa	Rp 274,259,000	
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa Yang Terbina	74 Desa	Rp 42,498,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa Yang Terbina	3 Desa	Rp 109,718,000	
3	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pilkades	74 Desa	Rp 327,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa Yang melaksanakan Pilkades	74 Desa	Rp 460,417,900	
4	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa	278 Desa	Rp 33,229,000	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa	200 Desa	Rp 18,129,000	

5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD Kab.KH	Jumlah Desa yang dibina Tata Kelola Aset Desa	278 Desa	Rp 65,250,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD Kab.KH	Jumlah Desa yang dibina Tata Kelola Aset Desa	200 Desa	Rp 59,749,800	
6	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang menyelesaikan Batas desa (perbup batas desa)	50 Perbup	Rp 27,450,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang menyelesaikan Batas desa (perbup batas desa)	110 Perbup	Rp 27,450,000	
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota					Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota					

1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	DPMD Kab.KH	Jumlah Lembaga Adat	59 orang	Rp 290,051,200	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)		Jumlah Lembaga Adat	59 orang	Rp 379,651,200	
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD Kab.KH	Jumlah Bumdes Sehat/Aktif	150 desa	Rp 65,687,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Bumdes Sehat/Aktif	150 desa	Rp 65,687,000	
3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD Kab.KH	Jumlah Kegiatan Terfasilitasi	2 Desa	Rp 2,900,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Kegiatan Terfasilitasi	2 Desa	Rp 2,900,000,000	
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD Kab.KH	Jumlah Tim yang Difasilitasi	20 Desa	Rp 69,340,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD Kab.KH	Jumlah Tim yang Difasilitasi	20 Desa	Rp 90,240,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada program yang ada pada RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu .

Untuk mencapai program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memperhatikan isu-isu penting menjadi masalah/ persoalan orang banyak.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 2.5.1
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	4	3	5	8
2	Urusan Pemebrdayaan Masyrakat dan Desa				
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen	3 Dok	
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen	1 Dok	
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen	1 Dok	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen	1 Dok	
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen	1 Dok	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen	9 Dok	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen	4 Dok	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Desa				
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Pegawai	12 Bln	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD	Jumlah Pengelola Keuangan	12 Bln	
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	6 Dok	
2.13.01.2.03	Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah				
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	
2.13.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	

2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD	Jumlah Jenis Pakaian Dinas	4 jenis	
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD	Jumlah orang/bulan tenaga pengelola Adminstras	180 Org/bln	
2.13.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD	Jumlah org yang mengikuti diklat dan pelatihan	8 orang	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8 komponen	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	24 jenis	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	9 dok	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	Jumlah bulan langganan	12 bln	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah tamu	12 Bln	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	250 Kali	
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD	Jumlah dokumen / arsip yang tertata	1 Dok	
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Jumlah sistem dn pelayanan elektronik	8 Org	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	DPMD	jumlah kendaraan dinas	3 unit	
2.13.01.2.07.06	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	12 unit	
2.13.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.13.01.2.08.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	DPMD	jumlah materai	700 Lbr	
2.13.01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	jumlah layanan komunikasi, sumber daya air, listrik	3 layanan	
2.13.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	jumlah tenaga kebersihan	264 org/bln	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	jumlah kendaraan	3 Unit	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	DPMD	jumlah jasa tenaga perbaikan	4 Unit	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	DPMD	jumlah kegiatan pemeliharaan/ Rehab Gedung Kantor	1 Unit	

2.13.02	Penataan Desa				
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	DPMD		14 desa	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama anatar Desa				
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD		50 desa	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
2.13.04.2.01	Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi				
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	278 Desa	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	jumlah desa yang mengikuti pelatihan	278 Desa	
			Jumlah Desa yang di dampingi penyusunan APBDes	278 Desa	
			jumlah desa yang di monev	50 Desa	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Dibina	94 Desa	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Terbina	278 Desa	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah Desa yang di Bina Tata Kelola Aset Desa	278 Desa	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD	Jumlah Desa yang Dibina dalam peningkatan Kapasitas anggota BPD	278 Desa	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	Jumlah desa yang di fasilitasi	50 perbub	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD	Jumlah desa yang dibina dalam pembuatan laporan kepala desa	94 Desa	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangan Desa	278 Desa	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Begerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota				
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayan dan Pendayagunan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	DPMD	Lembaga adat Jumlah Laporan	59 Desa	
				50 Laporan	

2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Desa	55	Desa	
			Jumlah Worksoft IDM	278	Desa	
			Sasaran Kemandirian desa	29	Desa	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Jumlah BUMDes dan Kelompok UsahaEkonomi Desa	278	Desa	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Jumlah Teknologi Tepat guna yang terfasilitasi	10	Kelompok	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	2	Desa	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD	Jumlah TIM PKK yang dibina	35	Tim pkk	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.2.





Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 - 2024 merupakan penjabaran visi - misi Gubernur yang bersinegi dengan Visi - misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi Visi, Misi, Tujuan, dan program Pemerintah Daerah. Mengacu Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2024 adalah:

**" TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN “**

Sebagaimana telah dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018 - 2024, bahwa terdapat 14 misi yang akan di tempuh selama 5 tahun kedepan dalam mencapai visi pembangunan daerah adalah :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur,
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur perbatasan
- c. Mempercepat pemekaran daerah
- d. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance
- e. Memperbaiki tata kelola pemerintahan
- f. Meningkatkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovasi
- g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi
- h. Mengurangi daerah tertinggal
- i. Mengurangi ketimpangan antar penduduk dan antar wilayah
- j. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
- k. Memperkuat peran dan fungsi penelitian
- l. Memantapkan ketertiban masyarakat
- m. Mewujudkan Masyarakat yang agamis dan bermoral
- n. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024.

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah agar dapat mempertanggung jawabkan kinerja yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 juga agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu berkarya dan berkembang dalam rangka peningkata kinerja profesionalnya.

Ada pun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah;

1. Untuk menjabarkan arahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 - 2026 kedalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Menjabarkan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 – 2026 kedalam tujuan, sasaran, dan program kerja oprasional;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, penigkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektifitas pembangunan sumber daya organisasi

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	3,2%
		Meningkatnya Kinerja penataan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	42,40%
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Bumdesma	5,75%
		Meningkatnya Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Penyelesaian Administrasi Batas Desa	50%
		Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Desa yang Memiliki Bumdes	92%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kinerja (RENJA) di tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 5 program sebagai berikut :

A. TUJUAN DPMD :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B. SASARAN DPMD :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan peringkat nilai evaluasi saki di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Kapuas hulu secara bertahap yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 5 Program yaitu:

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Desa

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyedia Jasa Surat Menyurat
- b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain

Program : Penataan Desa

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan

- a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status
- b. Fasilitasi tata wilayah desa
- c. Fasilitasi penataan kewenangan desa
- d. Fasilitasi penamaan dan kode desa
- e. Fasilitais penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota
- f. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa

Program : Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama Antar Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/ kota
- b. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota
- c. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan

Program : Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Evaluasi Pengawasan Peraturan Data
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa
- g. Penyelenggaran Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

- h. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- i. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- j. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- k. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- l. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- m. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- n. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat
- b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- d. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- f. Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- g. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- h. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
- i. Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini 3.3.1

Tabel 3.3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
2	Urusan Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa				17.332.688.594				17.554.495.654
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				17.332.688.594				17.554.495.654
2.13.01	Program :	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.329.726.294				3.462.663.654
2.13.01.2.01	Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.348.900				78.348.900
2.13.01.2.01.01	Sub. Kegiatan :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	2 Dok	9.321.600	DAU		2 Dok	9.321.600
2.13.01.2.01.02	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD	1 Dok	8.947.000	DAU		1 Dok	8.947.000
2.13.01.2.01.03	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD	1 Dok	10.591.400	DAU		1 Dok	10.591.400
2.13.01.2.01.04	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD	1 Dok	8.549.000	DAU		1 Dok	8.549.000
2.13.01.2.01.05	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD	1 Dok	9.499.000	DAU		1 Dok	9.499.000
2.13.01.2.01.06	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	9 Dok	18.179.600	DAU		9 Dok	18.179.600
2.13.01.2.01.07	Sub. Kegiatan :	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	1 Dok	13.261.300	DAU		1 Dok	13.261.300
2.13.01.2.02	Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.947.159.754				3.947.159.754

2.13.01.2.02.01	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	12 Bln	3.669.988.754	DAU		12 Bln	3.669.988.754
2.13.01.2.02.03	Sub. Kegiatan :	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD	11 Org	230.000.000	DAU		11 Org	230.000.000
2.13.01.2.02.04	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD	1 Dok	10.104.000	DAU		1 Dok	10.104.000
2.13.01.2.02.05	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	1 Dok	19.900.000	DAU		1 Dok	19.900.000
2.13.01.2.02.06	Sub. Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD	1 Dok	9.829.000	DAU		1 Dok	9.829.000
2.13.01.2.02.07	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD	3 Dok	7.338.000	DAU		3 Dok	7.338.000
2.13.01.2.03	Kegiatan :	Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah			11.635.000				14.500.000
2.13.01.2.03.01	Sub. Kegiatan :	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	DPMD	1 Dok	2.464.000	DAU		1 Dok	3.000.000
2.13.01.2.03.02	Sub. Kegiatan :	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	1 Dok	1.593.000	DAU		1 Dok	2.000.000
2.13.01.2.03.03	Sub. Kegiatan :	Koordinasi Penilaian Barang Milik daerah SKPD	DPMD	1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	3.000.000
2.13.01.2.03.05	Sub. Kegiatan :	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD	1 Dok	1.663.000	DAU		1 Dok	2.000.000
2.13.01.2.03.06	Sub. Kegiatan :	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	1 Dok	1.343.000	DAU		1 Dok	2.000.000
2.13.01.2.03.07	Sub. Kegiatan :	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD	1 Dok	2.072.500	DAU		1 Dok	2.500.000
2.13.01.2.05	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			273.000.000				273.000.000
2.13.01.2.05.02	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	DPMD	4 Mcm pakaian	160.000.000			4 Mcm pakaian	160.000.000
2.13.01.2.05.03	Sub. Kegiatan :	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD	1 Dok	3.000.000	DAU		1 Dok	3.000.000
2.13.01.2.05.09	Sub. Kegiatan :	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	DPMD	1 tahun	110.000.000			1 tahun	110.000.000
2.13.01.2.06	Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah			631.565.200				631.565.200
2.13.01.2.06.01	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	8 Komponen	3.324.000	DAU		8 Komponen	3.324.000

2.13.01.2.06.02	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlegkapan Kantor	DPMD		3.0000.000	DAU			3.500.000
2.13.01.2.06.03	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD	24 jenis	9.186.000	DAU		24 jenis	10.000.0000
2.13.01.2.06.05	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	9 Dok	36.661.000	DAU		9 Dok	40.000.000
2.13.01.2.06.06	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	12 Bln	3.420.000	DAU		12 Bln	3.420.000
2.13.01.2.06.08	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	12 Bln	73.440.000	DAU		12 Bln	80.000.000
2.13.01.2.06.09	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	250 Kali	450.000.000	DAU		250 Kali	500.000.000
2.13.01.2.06.10	Sub. Kegiatan :	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD	1 Dok	13.354.200	DAU		1 Dok	14.0000.0000
2.13.01.2.06.11	Sub. Kegiatan :	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	3 sistem	42.600.000	DAU		3 sistem	45.000.000
2.13.01.2.07	Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			226.763.000				231.763.000
2.13.01.2.07.02	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	1 unit	55.000.000	DAU		1 unit	55.000.000
2.13.01.2.07.06	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	DPMD	8 jenis	121.763.300	DAU		8 jenis	121.763.300
2.13.01.2.07.09	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	1 unit	50.000.000	DAU		1 Unit	55.000.000
2.13.01.2.08	Kegiatan :	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			896.254.440				945.200.000
2.13.01.2.08.01	Sub. Kegiatan :	Penyedia Jasa Surat Menyurat	DPMD	1600 Lbr	15.000.000	DAU		1600 Lbr	16.000.000
2.13.01.2.08.02	Sub. Kegiatan :	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	3 Layanan	79.200.000	DAU		3 Layanan	79.200.000
2.13.01.2.08.04	Sub. Kegiatan :	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	22 Org	802.054.440	DAU		22 Org	802.054.440
2.13.01.2.09	Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			155.000.000				155.000.000
2.13.01.2.09.01	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	3 unit	110.000.000	DAU		3 unit	110.000.000
2.13.01.2.09.06	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	DPMD	4 unit	5.000.000	DAU		4 unit	5.000.000
2.13.01.2.09.09	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana	DPMD	1 unit		DAU		1 unit	

		Gedung Kantor atau Bangunan Lain			40.000.000				40.000.000
2.13.02	Program :	Penataan Desa			4.070.000.000				4.080.000.000
2.13.02.2.01	Kegiatan :	Penyelenggaraan Penataan Desa			4.070.000.000				4.080.000.000
2.13.02.2.01.01	Sub. Kegiatan :	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status	DPMD	119 Desa	140.000.000	DAU		119 Desa	140.000.000
2.13.02.2.01.02	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi tata wilayah desa	DPMD	278 Desa	240.000.000	DAU		278 Desa	250.000.000
2.13.02.2.01.03	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi penataan kewenangan desa	DPMD	50 Desa	170.000.000	DAU		50 Desa	170.000.000
2.13.02.2.01.04	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi penamaan dan kode desa	DPMD	50 Desa	260.000.000	DAU		50 Desa	260.000.000
2.13.02.2.01.05	Sub. Kegiatan :	Fasilitais penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota	DPMD	69 Desa	270.000.000	DAU		69 Desa	270.000.000
2.13.02.2.01.06	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	DPMD	14 Desa	2.990.000.000	DAU		14 Desa	2.990.000.000
2.13.03	Program :	Peningkatan Kerjasama Desa			660.000.000				660.000.000
2.13.03.2.01	Kegiatan:	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa			660.000.000				660.000.000
2.13.03.2.01.01	Sub. Kegiatan :	Terlaksananya Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/ kota	DPMD	16 Desa	240.000.000	DAU		16 Desa	240.000.000
2.13.03.2.01.02	Sub. Kegiatan :	terlaksananya Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota	DPMD	20 Desa	180.000.000	DAU		20 Desa	180.000.000
2.13.03.2.01.03	Sub. Kegiatan :	Terlaksananya Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	DPMD	25 Desa	240.000.000	DAU		25 Desa	240.000.000
2.13.04	Program :	Program Administrasi Pemerintahan Desa			3.166.217.300				3.227.366.000
2.13.04.2.01	Kegiatan :	Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi			3.166.217.300				3.227.366.000
2.13.04.2.01.01	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	DPMD	278 Desa	547.620.000	DAU		278 Desa	550.000.000
2.13.04.2.01.02	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	DPMD	139 Desa	95.0000.000	DAU		139 Desa	95.0000.000
2.13.04.2.01.03	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	DPMD	278 Desa	185.000.000	DAU		278 Desa	185.000.000
2.13.04.2.01.04	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	278 Desa	550.000.000	DAU		278 Desa	550.000.000
2.13.04.2.01.05	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	DPMD	94 Desa		DAU		94 Desa	

		Pemerintahan Desa			106.798.000				107.000.000
2.13.04.2.01.06	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DPMD	278 Desa	170.000.000	DAU		278 Desa	170.000.000
2.13.04.2.01.07	Sub. Kegiatan :	Evaluasi Pengawasan Peraturan Data	DPMD	278 Desa	130.000.000	DAU		278 Desa	130.000.000
2.13.04.2.01.08	Sub. Kegiatan :	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa	DPMD	146 Desa	170.000.000	DAU		146 Desa	170.000.000
2.13.04.2.01.09	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	40 Desa	175.000.000	DAU		40 Desa	175.000.000
2.13.04.2.01.10	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD	35 Desa	400.000.000	DAU		35 Desa	450.000.000
2.13.04.2.01.11	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	278 Desa	85.479.000	DAU		278 Desa	88.000.000
2.13.04.2.01.12	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi manajemen pemerintah desa	DPMD	139 Desa	130.000.000	DAU		139 Desa	130.000.000
2.13.04.2.01.13	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	278 Desa	191.601.100	DAU		278 Desa	195.000.000
2.13.04.2.01.14	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD	278 Desa	87.366.000	DAU		278 Desa	87.366.000
2.13.04.2.01.15	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD	117 Perbu b	99.514.000	DAU		117 Perbu b	100.000.000
2.13.04.2.01.16	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD	94 Desa	79.928.200	DAU		94 Desa	80.000.000
2.13.04.2.01.16	Sub. Kegiatan :	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh desa	DPMD	139 Desa	65.000.0000	DAU		139 Desa	65.000.0000
2.13.04.2.01.18	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	278 Desa	72.920.000	DAU		278 Desa	75.000.000
2.13.05	Program	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							
2.13.05.2.01	Kegiatan :	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota			3.525.395.000				3.525.395.000
2.13.05.2.01.01	Sub. Kegiatan :	Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	DPMD	59 Desa	85.000.000	DAU		59 Desa	85.000.000
2.13.05.2.01.02	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Penataan, Pemberdayan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	DPMD	59 Desa	431.394.000	DAU		59 Desa	450.000.000

		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna)						
2.13.05.2.01.03	Sub. Kegiatan :	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	278 Desa	223.499.200	DAU	278 Desa	223.499.200
2.13.05.2.01.04	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan , (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	278 Desa	350.000.000	DAU	278 Desa	350.000.000
2.13.05.2.01.05	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	120 Desa	180.501.800	DAU	120 Desa	182.000.000
2.13.05.2.01.06	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	10 kelompok	120.000.000	DAU	10 kelompok	120.000.000
2.13.05.2.01.07	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD	2 Desa	2.000.000.000	DAU	2 Desa	2.000.000.000
2.13.05.2.01.08	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	DPMD	278 Desa	50.000.000	DAU	278 Desa	50.000.000
2.13.05.2.01.09	Sub. Kegiatan :	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	DPMD	58 Desa	165.000.000	DAU	58 Desa	165.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun rencana kerja (Renja) tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan tahun 2024. Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) berupa:

- a. Bagian alur tahapan penyusunan rencana kerja Satuan Perangkat Daerah.
- b. Persiapan penyusunan Renja SKPD
- c. Penyusunan rancangan Renja SKPD
- d. Pelaksanaan Format SKPD
- e. Penetapan Kerja SKPD

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing – masing .yang pada hakekatnya mengembang tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi , dan fungsi alokasi. Pada dasarnya wujud Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Pendapatan Daerah :

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber pada :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan yang bersumber pada:
 - a. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapata Daerah yang sah yang bersumber pada :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan Sistem Perencanaan Nasional yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap perkembangan zaman.

Penyusunan Renja tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari rencana kerja DPMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai alat umpan balik (Feed back) yang dapat digunakan manajemen dalam rangka memberikan masukan/pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas dan penjabaran dari Visi dan Misi SKPD.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjuk melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, 27 Febuari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu



LUPINUS, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001